

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Relasi Rusia dengan Ukraina telah menunjukkan kemunduran sejak tahun 2014. Situasi ini mencapai puncak eskalasinya pada tanggal 24 Februari 2022, di mana Rusia melancarkan operasi militer pertamanya terhadap Ukraina.¹ Berdasarkan data dari The United Nations Commissioner of Human Rights (UNCHR) per tanggal 2 Oktober 2022, telah terdapat sebanyak 15.246 korban yang jatuh dari penyerangan tersebut.² Angka ini sekaligus menandakan serangan militer yang disebut Vladimir Putin sebagai *Special Military Operation* (SMO) menjadi operasi militer terbesar semenjak berakhirnya Perang Dunia ke-2.³ Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan masih berlangsungnya operasi tersebut hingga saat ini.

Operasi militer itu nyatanya telah memberikan dampak global. Tercatat per tanggal 11 Oktober 2022, sebanyak 7.6 juta pengungsi Ukraina telah tersebar di beberapa negara bagian Uni Eropa (UE) untuk mencari tempat perlindungan.⁴ Aspek lain, seperti ekonomi, kelangkaan pasokan pangan, dan energi (minyak dan gas) dunia juga terdampak.⁵ Keadaan tersebut menggambarkan bahwa peristiwa ini

¹ Paul Kirby, "Why Has Russia Invaded Ukraine and What Does Putin want?," *BBC News*, last modified 9 Mei 2022, diakses 6 Oktober 2022, <https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589>.

² "Ukraine: Civilian Casualty Update 3 October 2022," *United Nations Commissioner of Human Rights*, last modified 3 Oktober 2022, diakses 6 Oktober 2022, <https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/ukraine-civilian-casualty-update-3-october-2022>.

³ Kirby, "Why Has Russia Invaded Ukraine and What Does Putin Want?"

⁴ "Situation Ukraine Refugee Situation," *United Nations High Commissioner of Refugees*, last modified 11 Oktober 2022, diakses 13 Oktober 2022, <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>.

⁵ Eko Setiadi, "Invasi Rusia dan Dampaknya Terhadap Geopolitik Global," *CNBC Indonesia*, last modified 7 Maret 2022, diakses 17 Oktober 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220307124740-14-320589/invasi-rusia-dan-dampaknya-terhadap-geopolitik-global>.

tidak lagi berdampak terhadap kedua negara, tetapi juga kestabilan negara-negara dunia.

Rusia sebagai negara *great power* membawa beberapa kepentingan utama dari kebijakan luar negerinya. Kepentingan itu antara lain untuk mempertahankan pengaruh Rusia terhadap *Commonwealth Independent States* (CIS) dan menjauhkan Rusia dari ancaman tekanan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.⁶ Berdasarkan dua kepentingan tersebut, tentu rencana ekspansi North Atlantic Treaty Organisation (NATO) terhadap negara-negara strategis Rusia akan dianggap Putin sangat bertentangan dan mengancam *national strategic interest* yang dimiliki Rusia. Oleh sebab itu, rencana keanggotaan Ukraina terhadap NATO oleh presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada awal tahun 2021 direspon keras oleh Putin.

Putin melihat Ukraina sebagai salah satu negara strategis bagi kepentingan keamanan Rusia.⁷ Situasi di mana Rusia dan Ukraina yang berbagi 2200-kilometer perbatasan, membuat Ukraina menjadi *buffer zone* geopolitik Rusia.⁸ Selain itu, Putin dalam artikel yang ditulisnya sendiri pada tahun 2021, juga menegaskan bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu kesatuan. Putin mengatakan, “*When I was asked about Russian-Ukrainian relations, I said that Russians and Ukrainians were one people – a single whole.*”⁹ Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap upaya eksternal

⁶ Dmitri Trenin, “A Five-Year Outlook for Russian Foreign Policy: Demands, Drivers, and Influences,” *White Paper: Task Force on US Policy Toward Russia, Ukraine, and Eurasia* (2016): 6, <http://carnegie.ru/2016/03/18/five-year-outlook-for-russian-foreign-policy-demands-drivers-and-influences/ivkm>.

⁷ Elias Götz, “It’s Geopolitics, Stupid: Explaining Russia’s Ukraine Policy,” *Global Affairs* 1, no. 1 (2015): 3–10, <http://dx.doi.org/10.1080/23340460.2015.960184>.

⁸ Elias Götz, “It’s geopolitics, stupid”, hlm 4.

⁹ Vladimir Putin, “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians,” *President of Russia*, last modified 12 Juli 2021, diakses 2 November 2022, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181>.

yang ditujukan untuk memiliterisasi dan menjauhkan Ukraina dari Rusia, akan dilihat sebagai tindakan *disrespectful* terhadap posisi geopolitik Rusia.

Atas dasar pemahaman di atas, SMO dilancarkan Putin berlandas pada dua alasan utama. Pertama, operasi itu dilakukan agar Ukraina mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan NATO.¹⁰ Kedua, serangan juga ditujukan untuk melepaskan rakyat Ukraina, khususnya Ukraina Timur dari upaya nazifikasi dan demiliterisasi oleh pemerintahan Ukraina.¹¹ Alasan ini disampaikan Putin dalam pernyataannya, “*This operation aims to save Russian people who have been suffering from abuse and genocide by the Kiev regime for eight years.*”¹² Berdasarkan dua alasan itu, Putin lalu menjustifikasi operasi militer yang dilakukannya berdasarkan Artikel ke-51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang membenarkan suatu negara untuk melakukan penyerangan dengan tujuan *self-defense*.¹³

Apabila dilihat dari birokrasi domestik Rusia, posisi pengambilan keputusan sepenuhnya didominasi oleh Putin sebagai presiden.¹⁴ Hal itu tertuang pada konstitusi negara Federasi Rusia tahun 1993 pasal 80 dan pasal 86, yang memberikan legitimasi wewenang kepada presiden untuk mengatur penuh

¹⁰ Marcy Oster, “Russia Doesn’t Want Ukraine to Join NATO. Is That a Reason to Invade?,” *The Medialine*, last modified 28 Februari 2022, diakses 31 Oktober 2022, <https://themedialine.org/news/russia-doesnt-want-ukraine-to-join-nato-is-that-a-reason-to-invade/>.

¹¹ Paul Kirby, “Perang Ukraina: Apa Yang Diinginkan Putin Dari Ukraina Untuk Mengakhiri Perang?,” BBC, 31 Maret 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60507911>.

¹² “West was Covering Up Crimes of Kiev Regime That Led to Ukraine’s Tragedy, Lavrov Says,” *TASS Russian News Agency*, last modified 25 Februari 2022, diakses 15 Oktober 2022, <https://tass.com/politics/1411067>.

¹³ “Ukraine: Debunking Russia’s Legal Justifications,” *Chatam House*, last modified 24 Februari 2022, diakses 28 Oktober 2022, <https://www.chathamhouse.org/2022/02/ukraine-debunking-russias-legal-justifications>.

¹⁴ Michael McFaul, *Putin, Putinism, and the Domestic Determinants of Russian Foreign Policy*, *International Security*, vol. 45, 2020.

kebijakan luar negeri negara.¹⁵ Keadaan ini membuat kebijakan SMO dapat diidentifikasi sebagai keputusan satu aktor, yaitu Presiden Putin.

Sebelum melancarkan operasi militer terhadap Ukraina, Putin telah melakukan upaya negosiasi kepada Joe Biden. Negosiasi itu ditandai dengan dikirimnya dua dokumen kepada AS dan NATO yang berisikan kepentingan-kepentingan Rusia.¹⁶ Kepentingan itu antara lain mengikat NATO untuk tidak melakukan ekspansi keanggotaan, tidak meletakkan pasukan dan senjata di wilayah strategis Rusia, serta larangan kepada AS dan Rusia untuk meletakkan senjata nuklir di luar batas teritorialnya.¹⁷ Sebagai gantinya, Putin berjanji akan menarik pasukan yang telah diletakkannya di perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Sayangnya, negosiasi itu ditolak oleh Joe Biden dengan mengatakan bahwa setiap negara berhak untuk menentukan kebijakan negaranya sendiri.¹⁸

Keputusan Putin untuk melancarkan operasi tersebut menuai tentangan berbagai pihak. PBB menyusun resolusi mengenai kecaman terhadap invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, yang mana mendapat dukungan 141 negara, 5 negara menolak, dan 35 negara *abstain*.¹⁹ Penolakan juga dapat dilihat dari berbagai sanksi yang diberikan negara-negara Barat terhadap Rusia, seperti pembekuan aset

¹⁵ *Russian Federation's Constitution of 1993*, 2018.

¹⁶ Gabrielle Tétrault Farber and Tom Balmforth, "Russia Demands NATO Roll Back From East Europe and Stay Out of Ukraine," *Reuters*, last modified December 18, 2021, diakses 12 Oktober 2022, <https://www.reuters.com/world/russia-unveils-security-guarantees-says-western-response-not-encouraging-2021-12-17/>.

¹⁷ I Gabrielle Tétrault Farber and Tom Balmforth, "Russia Demands NATO Roll Back From East Europe and Stay Out of Ukraine."

¹⁸ Gabrielle Tétrault Farber and Tom Balmforth, (2021).

¹⁹ Bernadette Aderi Puspaningrum, "Resolusi PBB Menyesalkan Invasi Rusia Ke Ukraina Dapat Dukungan Besar, China Abstain Lagi, 5 Menentang," *Kompas*, 3 Maret 2022, <https://www.kompas.com/global/read/2022/03/03/091620870/resolusi-pbb-menyesalkan-invasi-rusia-ke-ukraina-dapat-dukungan-besar?page=all>.

finansial, energi, dan penutupan berbagai perusahaan Rusia di luar negeri.²⁰ Hal tersebut secara nyata telah memberatkan posisi Rusia saat ini.

Meskipun menuai berbagai tentangan internasional, keputusan Putin justru mendapat dukungan pada tingkat domestik. Levada Center, sebuah lembaga non-pemerintahan di Rusia, menyebutkan bahwa sebesar 52% masyarakat Rusia berpandangan negatif terhadap Ukraina, 60% menyalahkan NATO dan AS sebagai penyebab masalah di Ukraina, dan hanya 4% masyarakat Rusia yang menyalahkan Rusia atas penyerangan tersebut.²¹ Hasil yang kurang lebih sama juga didapatkan dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga lain, seperti Savanta ComRes, VCIOM, CNN, dan Washington Post.²² Masyarakat Rusia meyakini bahwa operasi militer itu adalah benar dan harus dilakukan untuk melindungi Rusia dari pengaruh Barat dan masyarakat Ukraina Timur dari upaya nazifikasi.²³

Kebijakan yang diambil Putin untuk melancarkan SMO terhadap Ukraina memperlihatkan bahwa terdapat suatu kepentingan yang ingin dicapai dari kebijakan itu secara politik. Meskipun sejauh ini keputusan tersebut terlihat memberatkan Rusia dari berbagai sanksi yang diberikan, namun tentu Putin memiliki pertimbangan tersendiri. Berdasarkan hal ini, menarik dikaji lebih dalam terkait proses pengambilan kebijakan SMO dalam penerapannya sehingga dapat menjelaskan perhitungan Putin sebagai pengambil kebijakan.

²⁰ Sami Moisio, "Geopolitics of Explaining Russia's Invasion of Ukraine and the Challenge of Small States," *Political Geography* 97 (2022).

²¹ Denis Volkov and Andrei Kolesnikov, *My Country, Right or Wrong: Russian Public Opinion on Ukraine*, 2022.

²² Kseniya Kizlova and Pippa Norris, "What Do Ordinary Russians Really Think About the War in Ukraine," *The London of Economics and Political Science*, last modified March 17, 2022, diakses 12 Januari 2023, <https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2022/03/17/what-do-ordinary-russians-really-think-about-the-war-in-ukraine/>.

²³ *My Country, Right or Wrong: Russian Public Opinion on Ukraine*, 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan Rusia untuk melancarkan *Special Military Operation* terhadap Ukraina dapat dilihat sebagai keputusan yang berani di abad ke-21 ini. Operasi itu tidak hanya menimbulkan kerugian yang besar terhadap Ukraina, tetapi juga memberikan Rusia sejumlah dampak negatif. Berbagai kecaman serta sanksi internasional yang diberikan negara-negara dunia, terutama Barat, secara nyata telah memberatkan keadaan Rusia. Kebijakan itu tentu tidak lepas dari pengaruh Putin sebagai presiden, di mana sistem pemerintahan presidensial yang dijalankan Rusia, telah menempatkan Putin menjadi aktor utama dalam memutuskan setiap kebijakan luar negeri yang akan diambil. Meskipun sejauh ini serangan tersebut terlihat memberikan sejumlah dampak negatif terhadap Rusia, namun tentu Putin telah melakukan berbagai proses pertimbangan sebelum mengambil keputusan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai proses pengambilan keputusan yang dilakukan Vladimir Putin dalam kebijakan Rusia untuk melancarkan *Special Military Operation* terhadap Ukraina pada tahun 2022.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana proses pengambilan keputusan Vladimir Putin dalam menerapkan kebijakan *Special Military Operation* terhadap Ukraina pada tahun 2022?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan Vladimir Putin dalam menerapkan kebijakan *Special Military Operation* terhadap Ukraina pada tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam studi Hubungan Internasional mengenai bagaimana proses seorang pemimpin negara dalam memutuskan kebijakan luar negeri atas suatu isu dan fenomena yang terjadi;
- b. Secara praktis, penelitian ini diharap dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait analisis respon kebijakan luar negeri suatu negara, khususnya negara Federasi Rusia di bawah pemerintahan Presiden Vladimir Putin.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam upaya menganalisis dan mencari jawaban dari penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa literatur dan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan serta berkontribusi dalam mendukung analisis penelitian. Literatur tersebut antara lain:

Literatur pertama adalah tulisan dari John Mearsheimer pada tahun 2014 yang berjudul *Why the Ukraine Crisis is the West Fault (The Liberal Delusions that Provoked Putin)*.²⁴ Mearsheimer dalam tulisan ini menjelaskan analisis terkait pernyataannya bahwa krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina di tahun 2014 adalah kesalahan dari AS dan sekutunya. Analisis tersebut dilandaskan Mearsheimer pada tiga alasan utama, yaitu perluasan keanggotaan NATO, ekspansi Uni Eropa (UE), dan misi penyebarluasan demokrasi.

²⁴ John Mearsheimer, "Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin," *Foreign Affairs* 93, no. 5 (September/October) (2014): 77–89.

Alasan ekspansi NATO dan Uni Eropa dijelaskan Mearsheimer telah melewati batas teritorial strategis yang dimiliki oleh Rusia. Perluasan anggota NATO sejak tahun 1991 yang juga memasukkan beberapa negara pecahan Uni Soviet, dinilai Putin telah mendiskreditkan kepentingan strategis Rusia di kawasan. NATO terhitung sejak tahun 1993, telah melakukan dua kali penambahan keanggotaannya. Ketika NATO mengeluarkan pernyataan bahwa akan menerima Georgia dan Ukraina untuk bergabung di tahun 2008, Rusia langsung merespon keras, dapat dilihat dari dilakukannya penyerangan terhadap Georgia pada saat itu. Serangan tersebut dilihat Mearsheimer sebagai bentuk tekanan terhadap NATO bahwa Rusia sebagai salah satu negara *great power*, tidak akan memberi toleransi terhadap apapun yang bergesekan dengan kepentingan keamanan nasionalnya.

Situasi yang sama juga terjadi di Ukraina pada tahun 2014. Jatuhnya Presiden Victor Yanukovych yang pro terhadap Rusia dilihat sebagai bentuk *coup* oleh pihak Barat untuk mendegradasi pengaruh Rusia di Ukraina. Oleh sebab itu, Mearsheimer memandang bahwa aneksasi terhadap Krimea sangat rasional dilakukan Rusia, bukan karena Putin yang dinilai sebagai *old-fashioned leader*, melainkan AS dan sekutunya yang dianggap telah gagal mempertimbangkan kepentingan Rusia dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini juga yang telah menjustifikasi tindakan Rusia atas aneksasinya terhadap Krimea, yang mana ditujukan untuk mengantisipasi NATO meletakkan pangkalan militernya di sana. Upaya penyebaran paham demokrasi terhadap Ukraina juga dipandang sebagai bentuk usaha menjauhkan Ukraina dari orbit pengaruh Rusia.

Poin yang juga menarik dari tulisan Mearsheimer ini adalah mengenai pilihan yang dipilih Putin pada keputusannya menganeksasi Krimea. Pertama,

Mearsheimer berargumen bahwa Putin sama sekali tidak memiliki niat untuk menginvasi Ukraina secara keseluruhan. Argumen itu didasarkan pada fakta 15 juta penduduk Ukraina dilihat sebagai angka yang sangat besar bagi Rusia untuk ditaklukkan. Meskipun nantinya Rusia berhasil menguasai Ukraina, biaya yang ditimbulkan dari pergerakan masyarakat dan efek dari sanksi yang diberikan Barat dinilai tidak akan menguntungkan Rusia. Kedua, dilandaskan pada argumen *realist*, negara akan cenderung untuk mengabaikan sanksi internasional apabila terdapat sesuatu yang dinilai akan mengganggu *core strategic interest* negaranya.

Berdasarkan beberapa poin yang disampaikan di atas, maka artikel ini akan membantu penelitian ini dalam beberapa aspek. Pertama, argumen mengenai rasionalisasi pilihan Putin untuk menganeksasi Krimea pada tahun 2014 akan membantu penelitian ini untuk memahami *core strategic interest* yang dimiliki Rusia dan bagaimana pendekatan Putin untuk mempertahankannya. Kedua, tulisan ini akan membantu dalam menjelaskan justifikasi kebijakan asertif yang dilakukan oleh Putin berdasarkan keputusannya dalam menganeksasi Krimea. Ketiga, membantu penelitian saat ini untuk menggambarkan kepentingan yang sebenarnya ingin dicapai oleh Rusia dalam penyerangannya terhadap Ukraina. Perbedaan tulisan Mearsheimer dengan penelitian ini terletak pada tingkat dan tujuan analisisnya. Penelitian ini akan menjelaskan tahapan penilaian keputusan oleh Putin pada invasi Rusia-Ukraina di tahun 2022, sedangkan tulisan dari Mearsheimer memaparkan analisis mengenai justifikasi aneksasi Krimea oleh Rusia terhadap Ukraina di tahun 2014.

Literatur kedua adalah tulisan dari Elias Götz pada tahun 2015 yang berjudul *It is Geopolitics, Stupid: Explaining Russia's Ukraine Policy*.²⁵ Götz dalam tulisan tersebut menjelaskan analisisnya terkait dengan kebijakan aneksasi Krimea yang dijalankan oleh Rusia pada tahun 2014. Menurutnya, penilaian mayoritas para peneliti pada saat itu keliru melihat tindakan Rusia yang asertif terhadap Ukraina disebabkan oleh Putin secara individual. Tulisan ini memaparkan bahwa meskipun nantinya Putin tidak lagi memimpin Rusia, pendekatan yang akan dilakukan Rusia akan tetap sama. Berlandaskan pada kepercayaan tersebut, Götz mendasari analisisnya pada tiga argumen utama, yaitu lokasi geografis Ukraina terhadap Rusia, peningkatan aktivitas UE terhadap Ukraina, dan orientasi *pro-western* yang dijalankan oleh pemerintahan Ukraina saat itu.

Penjelasan pertama terkait dengan posisi Ukraina yang strategis terhadap Rusia. Letak kedua negara yang berbatasan langsung sepanjang 2200-kilometer, membuat Ukraina menjadi negara yang harus dipertahankan Rusia untuk tetap netral dan jauh dari aliansi militer dengan blok lain. Kepentingan ini dilihat telah dicapai oleh Rusia saat Victor Yanukovych menjadi presiden Ukraina pada tahun 2010 hingga 2014. Yanukovych yang condong terhadap Rusia, seringkali mengabaikan berbagai tawaran kerja sama dari Barat, seperti tawaran keanggotaan NATO. Namun, Yanukovych juga dinilai tidak sepenuhnya memenuhi keinginan Rusia, yang mana terlihat dari dimulainya negosiasi kerja sama ekonomi dan politik dengan UE. Tentu apabila kerja sama tersebut terjadi, maka akan memudahkan Ukraina untuk bergabung dengan kebijakan *common security and defense* milik

²⁵ Götz, "It's Geopolitics, Stupid: Explaining Russia's Ukraine Policy."

UE, yang secara lebih lanjut akan memudahkan pengaruh NATO untuk masuk ke Ukraina.

Setidaknya terdapat dua jenis respon yang akan diberikan oleh *great powers* apabila dihadapkan pada situasi yang mengancam geopolitiknya. *Great powers* di posisi tekanan politik yang rendah, akan merespon dengan memberikan tawaran ekonomi dan pengaturan kembali institusi terhadap negara tetangganya. Namun, apabila tekanan politik yang diberikan besar, maka *great powers* akan cenderung menggunakan kebijakan yang bersifat asertif. Tinggi rendahnya tekanan politik dapat diidentifikasi berdasarkan seberapa signifikan dan berdampak pilihan yang diberikan oleh *strategic states* terhadap keamanan geopolitik *great powers*.

Artikel ini dinilai akan berkontribusi terhadap beberapa poin. Pertama, artikel ini menjelaskan mengenai urgensi kepentingan geopolitik yang dimiliki oleh Rusia untuk menjauhkan negara-negara bekas Uni Soviet dari pengaruh AS dan UE. Hal ini akan membantu dalam menganalisis aspek *non-compensatory* Rusia sebagai sebuah negara. Kedua, penjelasan mengenai respon *great power* pada masing-masing tingkatan tekanan politik akan membantu penelitian ini dalam mengategorikan tekanan yang dirasakan oleh Rusia pada kasus Rusia-Ukraina di tahun 2022. Terakhir, analisis mengenai geopolitik Rusia akan membantu upaya *mapping* kepentingan Rusia sebagai *great power* dalam mempertahankan pengaruhnya dengan negara-negara sekitarnya. Perbedaan analisis tulisan Götz dengan penelitian ini berada pada aspek teori yang digunakan, tingkat analisis, dan studi kasus yang diambil.

Artikel ketiga adalah Analisis Kebijakan Penjualan Senjata Militer Donald Trump ke Arab Saudi oleh Muhamad Rachmat Hidayatullah tahun 2019.²⁶ Tulisan Rachmat memaparkan analisis poliheuristiknya terhadap kebijakan Donald Trump untuk melanjutkan perdagangan senjata kepada Arab Saudi. Kebijakan yang sama pernah dijalankan oleh Barack Obama, namun dihentikan sebab begitu banyaknya tentangan oleh kongres AS terkait dengan isu hak asasi manusia (HAM) yang ditimbulkan. Pada masa kepemimpinan Trump, kebijakan itu kembali dijalankan dengan nilai kontrak jangka panjang sebesar 350 juta dolar. Kebijakan tersebut sempat disetujui oleh kongres AS dengan syarat bahwa ada jaminan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap HAM akan penggunaan senjata tersebut. Situasi berubah ketika munculnya isu penghilangan Jamal Khashoggi, seorang jurnalis di Arab Saudi, yang dicurigai dibunuh oleh pemerintah Arab Saudi. Akibat hal itu, kongres AS melarang penjualan senjata ke Arab Saudi, namun usul itu diveto oleh Trump.

Rachmat menganalisis bahwa pilihan Trump akan keputusan tersebut didasarkan pada kepribadian Trump yang berpengaruh terhadap kepemimpinannya. Tulisan ini mendeskripsikan Trump memiliki tingkat *confident* yang tinggi untuk dapat mengontrol situasi dan cenderung *task-oriented leader*. Kepercayaan diri itu membuat Trump yakin bahwa kebijakan yang dilakukan adalah tepat menurut dirinya sendiri. Kebijakan penjualan senjata ini ditujukan Trump untuk membantu Arab Saudi dalam melawan Iran di Yaman. Pada aspek *task-oriented leader*, Trump adalah tipe pemimpin yang mengutamakan tujuan yang hendak dicapai

²⁶ Muhamad Rachmat Hidayatullah, "Analisis Kebijakan Penjualan Senjata Militer Donald Trump Ke Arab Saudi," *Journal of International Relations* 5, no. 4 (2019): 744–753, <http://ejournal2s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

dibandingkan dengan hubungan dengan koleganya. Hal ini dapat diidentifikasi dari slogan politik *America First* dan *Make America Great Again* milik Trump, di mana untuk mencapai kedua hal itu, AS dinilai harus kuat dalam aspek ekonomi dan banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Isu yang sekiranya dapat menghambat kepentingan itu (seperti HAM) dianggap tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, keputusan untuk melanjutkan perdagangan senjata terhadap Arab Saudi dinilai Trump akan menguntungkan pada aspek domestik politik yang dimilikinya dan *core strategic interest* AS untuk menumbuhkan ekonominya sebagai negara *great power*. Artikel ini membantu peneliti sebagai contoh langsung dari penerapan teori poliheuristik dalam menganalisis kebijakan luar negeri. Contoh kasus yang membawa AS sebagai *great power* juga dinilai akan berkolerasi dengan studi kasus Rusia terhadap Ukraina dalam melihat bagaimana Trump sebagai presiden AS saat itu mempertimbangkan kebijakan yang dijalankan terkait dengan status tersebut.

Rujukan keempat adalah artikel yang berjudul *Russia's Foreign Policy Over the Past Three Decades: Change and Continuity* yang ditulis oleh Fenghua Liu pada tahun 2021.²⁷ Pada tulisan ini, Liu menjelaskan analisis mengenai dinamika kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Rusia dari tahun 1991 hingga 2021. Berdasarkan analisisnya, Liu mengatakan bahwa kebijakan politik luar negeri Rusia dalam rentang tahun tersebut telah melalui enam kali tahapan evolusi, yaitu pada tahun 1991-1995 (*pro-western diplomacy*), 1996-2000 (*multipolar diplomacy*), 2001-2004 (*great power pragmatism*), 2005-2008 (*neo slavism*), 2009-2013

²⁷ Fenghua Liu, "Russia's Foreign Policy Over the Past Three Decades: Change and Continuity," *De Gruyter 2*, no. 1 (2022): 86–99.

(*stability and cooperation diplomacy*), dan 2014-sekarang (*great power diplomacy*). Penjelasan artikel ini terdiri dari deskripsi kebijakan yang telah dijalankan oleh Rusia dari 1991 hingga 2021 dan prediksi terkait kebijakan luar negeri Rusia ke depannya.

Tulisan ini menganalisis bahwa keberlanjutan kebijakan luar negeri Rusia ke depannya tidak akan jauh dari mempertahankan status dan kepentingannya sebagai *great power*. Hal ini berarti bahwa setiap upaya westernisasi yang memasuki *buffer zones* Rusia, tidak dapat ditoleransi. Kedua, *national security* akan selalu menjadi kepentingan yang diutamakan di atas kepentingan yang lain oleh Rusia. Ketiga, Rusia akan mengejar kekuatan internasional. Hal itu berarti bahwa Rusia akan meningkatkan pengaruhnya terhadap negara-negara CIS, keterlibatan dalam isu-isu internasional, dan mempertahankan stabilitas kepentingan strategis dengan AS. Keempat, mempertahankan dan membentuk mekanisme internasional sesuai dengan kepentingannya. Terakhir, Rusia juga akan mengedepankan diplomasi ekonomi untuk melindungi kepentingannya di pasar internasional dan modernisasi ekonomi domestik.

Artikel ini dinilai akan membantu penelitian ini dengan memberi gambaran terkait dinamika kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Rusia selama tiga periode sebelumnya. Selain itu, prediksi yang diberikan Liu akan menambah *insight* dalam penelitian ini dalam menganalisis aspek-aspek yang dinilai akan mempengaruhi jalannya kebijakan luar negeri Rusia ke depannya. Tulisan Liu berbeda dengan penelitian ini pada aspek penekanan analisisnya yang mengacu pada kebijakan luar negeri Rusia secara keseluruhan dan prospeknya terhadap

kebijakan luar negeri ke depannya, sedangkan penelitian ini membahas analisis poliheuristik SMO Rusia pada tahun 2022 terhadap Ukraina.

Artikel terakhir adalah *Why Russia Attacked Ukraine: Strategic Culture and Radicalized Narratives* yang ditulis oleh Elias Götz dan Jorgen Staun pada tahun 2022.²⁸ Tulisan ini memaparkan analisis Götz dan Staun mengenai alasan penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina yang terjadi pada tahun 2022 melalui perspektif *strategic culture*, yang didefinisikan sebagai analisis seperangkat ekspresi dan narasi terkait dengan keamanan militer, yang disampaikan oleh pemimpin suatu negara. Setidaknya terdapat dua poin analisis *strategic culture* yang dapat disimpulkan, yaitu kerentanan Rusia akan perluasan pengaruh Barat terhadap negara-negara CIS, pada kasus ini Ukraina, sebagai *buffer zone* terakhir yang dimiliki oleh Rusia dan status *great power* Rusia di dalam sistem internasional.

Pada asumsi kerentanan Rusia terhadap Barat, keamanan nasional Rusia menekankan pada pentingnya memiliki *buffer zones*. Kerentanan itu ditimbulkan dari batas wilayah Rusia yang luas, sehingga mengakibatkan Rusia sulit untuk mempertahankan negaranya sendiri pada satu waktu yang sama. Oleh sebab itu, penting untuk dapat mengendalikan negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Götz dan Staun mengutip pernyataan oleh Fyodor Lukyanov, seorang direktur dari International Research Club, yang intinya adalah memperkuat *strategic depth* adalah satu satunya cara untuk menjamin keamanan Rusia. Selain itu, ekspansi NATO sebagai *the main risk* tetap menjadi prioritas. Ancaman juga

²⁸ Elias Götz and Jørgen Staun, "Why Russia Attacked Ukraine: Strategic Culture and Radicalized Narratives," *Contemporary Security Policy* 43, no. 3 (2022): 482–497, <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=fcsp20>.

mengenai Barat yang melemahkan pengaruh Rusia melalui *color revolution*, dengan menjatuhkan pemimpin-pemimpin negara Eurasia yang pro terhadap Rusia.

Poin kedua mengenai status *great power* Rusia. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan *privilege interest* Rusia terhadap negara-negara CIS. Status ini sering muncul di *Russian strategy papers*, yang mana Rusia disebut dengan *regional great power* atau *leading world powers*. Elit-elit Rusia juga mengatakan bahwa Rusia harus menjadi *great power*, jika tidak, maka Rusia tidak akan bertahan dalam sistem internasional. Pernyataan ini sejalan dengan pemahaman Rusia bahwa sistem internasional adalah sistem dengan beberapa *great powers* di dalamnya yang memiliki orbit pengaruhnya masing-masing.

Arah kebijakan Ukraina terhadap Barat dinilai Götz dan Staun sangat bertentangan dengan keamanan nasional Rusia dan status Rusia sebagai *great power*. Hal ini yang lalu menekan Putin untuk bersifat radikal. Tindakan itu juga didorong oleh pernyataan Boris Yeltsin pada tahun 1996 bahwa Rusia tidak akan menjadi *great power* tanpa adanya *strategic alliance* dengan Ukraina. Hal yang sama disampaikan oleh seorang politikus Rusia, Anatoly Lukyanov, pada tahun 2013, di mana fokus proyek penyatuan Eurasia bukanlah kepada negara Eurasia secara keseluruhan, melainkan terhadap Ukraina.

Berdasarkan analisis di atas, maka tulisan Götz dan Staun ini akan berkontribusi dalam menggambarkan dinamika politik domestik Rusia dalam responnya terhadap Ukraina. Berbagai kutipan pidato dan pernyataan yang ada di dalam artikel ini juga akan berkontribusi dalam mendukung argumen yang akan ditulis pada penelitian ini. Artikel Götz dan Staun berbeda dengan penelitian ini

pada aspek analisisnya, yang mana pada penelitian ini akan diteliti mengenai pengukuran dan proses pengambilan keputusan Putin dalam melancarkan SMO, sedangkan tulisan dari Götz dan Staun menganalisis pada aspek *strategic culture* dari penyerangan tersebut.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Kebijakan Luar Negeri

Aastha Goyal mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai strategi yang dimiliki negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di dalam sistem internasional.²⁹ George Modelski menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah sistem aktivitas yang dikembangkan oleh komunitas-komunitas terintegrasi di dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku negara lain dan mengukur kepentingannya dalam dinamika global.³⁰ Gagasan yang sama juga disampaikan oleh Bojang AS, di mana kebijakan luar negeri dilihat sebagai suatu hasil dari aktivitas politik di dalam negara yang ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional dan menempatkan negara itu sendiri di posisi yang tepat di antara negara-negara lain.³¹ Berdasarkan pada definisi-definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri akan selalu terkait dengan tiga aspek utama, yaitu strategi (rancangan yang disusun oleh aktor dalam negara terhadap perilakunya di sistem internasional), *national interest*, dan hubungan dengan negara

²⁹ Aastha Goyal, "An Insight into India's Foreign Policy," *Indian Journal of Law and Legal Research* 4, no. 2 (2022).

³⁰ Fatih Tayfur, "Main Approaches to the Study of Foreign Policy," *METU Studies in Development* 21, no. 1 (1994): 113–141.

³¹ Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06, no. 04 (2018).

lain. Kebijakan itu akan menjadi penunjuk arah bagi suatu negara terkait jalan yang akan dituju di tengah dinamika kompleks sistem internasional.

Bojang dalam menjelaskan kebijakan luar negeri, menambahkan bahwa terdapat dua faktor determinan dalam proses pembuatannya, yaitu faktor internal dan eksternal.³² Faktor eksternal mengacu pada distribusi kekuasaan di sistem internasional, seperti perlombaan senjata dan pembentukan aliansi. Sebaliknya, faktor internal yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri, yaitu faktor geografi, populasi, budaya perkembangan ekonomi, sejarah, sumber daya alam, opini publik, sistem politik, partai politik, dan personalitas atau karakter dari pemimpin negaranya. Pada faktor internal, Modelski menambahkan bahwa pembuat kebijakan sangat berperan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri.³³ Pembuat kebijakan tersebut menurut Hermann dapat berasal dari seorang pemimpin, kelompok, atau koalisi di dalam negara.³⁴

James Rosenau memaparkan tiga konsep kebijakan luar negeri, yaitu sebagai klaster orientasi, sebagai seperangkat komitmen dan rencana aksi, dan sebagai bentuk perilaku negara.³⁵ Klaster orientasi berarti nilai dan persepsi suatu negara yang didapat melalui proses sejarah sebelumnya yang menandakan posisi negara tersebut di perpolitikan dunia. Orientasi ini akan dijadikan sebagai penunjuk arah terhadap pengambil kebijakan suatu negara ketika dihadapkan pada isu eksternal. Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen merujuk pada

³² Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations,".

³³ Tayfur, "Main Approaches to the Study of Foreign Policy."

³⁴ Margaret G Hermann, "Foreign Shape Policy : A Theoretical Framework," *International Studies Review* 3, no. 2 (2001): 47–81.

³⁵ James Rosenau, "The Study of Foreign Policy," in *World Politics: An Introduction*, 1st ed. (New York: Free Press, 1976).

strategi, keputusan, dan kebijakan-kebijakan yang dapat diamati ketika negara dihadapkan pada lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku mengacu pada langkah nyata yang dilakukan negara sebagai terjemahan dari orientasi yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dilihat dari kebijakan SMO yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022, maka dapat ditarik kesimpulan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk respon Rusia terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Respon itu lalu didasarkan pada pemahaman Vladimir Putin sebagai presiden Rusia terhadap sejarah, nilai-nilai, dan persepsi yang dimiliki Rusia melalui proses sejarah yang terjadi sebelumnya. Hal itulah yang lalu diterjemahkan melalui kebijakan SMO sebagai strategi untuk mempertahankan posisi negaranya sebagai *great power*.

1.7.2. Teori Poliheuristik

Untuk menganalisis kebijakan SMO yang dijalankan Putin terhadap Ukraina pada tahun 2022, peneliti menggunakan teori poliheuristik sebagai pisau analisis. Teori yang ditemukan oleh Alex Mintz pada tahun 1993 ini, secara umum terdiri dari kata *poly* (yang berarti banyak) dan *heuristic* (yang berarti jalan pintas).³⁶ Berdasarkan dua makna tersebut, maka poliheuristik dapat dipahami sebagai mekanisme analisis kebijakan luar negeri yang dilakukan untuk mengurangi kompleksitas pilihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap keputusan yang diambil. Heuristik berarti memberi kompensasi untuk informasi

³⁶ Alex Mintz, "How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective," *Journal of Conflict Resolution* 48, no. 1 (2004): 3–13.

yang tidak lengkap dengan memberi jalan pintas kognitif pada suatu situasi yang kompleks dengan mengatur informasi pengambilan keputusan.³⁷

Analisis teori ini akan melibatkan pendekatan kognitif dan pilihan rasional pada suatu kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin.³⁸ Pendekatan kognitif mengungkap bagaimana proses pemimpin sampai kepada keputusan yang diambil, sedangkan pendekatan rasional fokus dalam menjelaskan mengapa pemimpin memutuskan untuk mengambil kebijakan tersebut. Teori poliheuristik dijelaskan oleh Alex Mintz dapat digunakan untuk menganalisis keputusan pengambil kebijakan, baik pada negara yang demokratis, maupun pemimpin pada negara yang non-demokratis.³⁹ Pengambil kebijakan tersebut dapat dalam tingkat individu, kelompok, atau koalisi, tergantung pada siapa pihak yang mengambil kebijakan dalam suatu negara.⁴⁰

Teori poliheuristik dalam penerapannya dilandaskan pada lima prinsip utama.⁴¹ *Nonholistic* atau *non-exhaustive search* diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang pemimpin dalam proses analisis kebijakan-kebijakan alternatif yang dimilikinya, hanya meninjau sebagian informasi tentang keputusan tersebut. Jenis pencarian informasi ini terkait dengan penggunaan heuristik karena melakukan penyederhanaan pada tahap kognitif, di mana tidak semua informasi diakses dan

³⁷ Alex Mintz et al., "The Effect of Dynamic and Static Choice Sets on Political Decision Making: An Analysis Using the Decision Board Platform," *American Political Science Review* 91, no. 3 (1997): 553–566.

³⁸ Alex Mintz, "Applied Decision Analysis: Utilizing Poliheuristic Theory to Explain and Predict Foreign Policy and National Security Decisions," *International Studies Perspectives* 6, no. 1 (2005): 94–98.

³⁹ Alex Mintz, "Applied Decision Analysis: Utilizing Poliheuristic Theory to Explain and Predict Foreign Policy and National Security Decisions."

⁴⁰ Mintz, "How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective."

⁴¹ Mintz et al., "The Effect of Dynamic and Static Choice Sets on Political Decision Making: An Analysis Using the Decision Board Platform."

dievaluasi. Pengambil kebijakan cenderung hanya akan mengumpulkan informasi yang terkait dengan dimensi politiknya.

Dimension-based process adalah situasi di mana pilihan alternatif akan dieliminasi apabila tidak memberi keuntungan pada satu dimensi krusial. Pilihan alternatif biasanya akan ditinjau berdasarkan dimensi tersebut dan tidak semua pilihan alternatif pada dimensi lain akan ditinjau oleh pengambil kebijakan. Oleh sebab itu, Mintz mengatakan dimensi politik sebagai *essence of decision* atau dimensi yang selalu diutamakan oleh seorang pemimpin dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil.⁴² Hal ini juga berkorelasi dengan aspek selanjutnya, yaitu *non-compensatory decision making*, yang berarti bahwa apabila suatu pilihan alternatif berdampak buruk pada satu dimensi krusial (yaitu dimensi politik domestik, *regime survival*, dll), maka keuntungan yang dimiliki alternatif tersebut pada dimensi lainnya tidak dapat dikompensasi.⁴³

Aspek selanjutnya adalah *satisficing process*, yang berarti suatu kebijakan yang diambil dapat bersifat “*acceptable*” sebab poliheuristik memungkinkan situasi di mana tidak semua pilihan alternatif pada dimensi lain akan dipertimbangkan oleh seorang pemimpin.⁴⁴ Keadaan ini lalu menyebabkan suatu kebijakan yang diambil tidak selalu menjadi kebijakan yang terbaik dan benar, melainkan kebijakan yang dapat mengisi kepentingan dari pengambil kebijakan tersebut. Terakhir, *order sensitivity* mengindikasikan bahwa urutan suatu informasi

⁴² Mintz, “Applied Decision Analysis: Utilizing Poliheuristic Theory to Explain and Predict Foreign Policy and National Security Decisions.”

⁴³ Raymond Dacey and Lisa J. Carlson, “Traditional Decision Analysis and the Poliheuristic Theory of Foreign Policy Decision Making,” *Journal of Conflict Resolution* 48, no. 1 (2004): 38–55.

⁴⁴ Alex Mintz and Karl DeRouen, “Understanding Foreign Policy: Decision Making,” *Understanding Foreign Policy: Decision Making*, no. December 2019 (2010): 1–168.

yang disajikan terhadap pengambil kebijakan akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Pengambil kebijakan akan sangat peka terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan dimensi politiknya.

Seorang pengambil kebijakan akan selalu melalui dua tahapan utama dalam pengambilan keputusannya. Pada tahap pertama pemimpin akan menggunakan prinsip *non-compensatory*, di mana pemimpin akan mengeliminasi pilihan alternatif yang dilihat tidak akan menguntungkan pada suatu dimensi.⁴⁵ Alternatif yang dinilai memiliki nilai rendah terhadap satu dimensi krusial, meskipun memiliki nilai tinggi pada alternatif lainnya, akan tetap dieliminasi.

Dimensi yang biasanya digunakan sebagai pertimbangan utama oleh seorang pemimpin dalam kebijakan luar negerinya adalah politik domestik.⁴⁶ Pertimbangan politik domestik itu dapat berupa opini publik, elektabilitas politik seorang pemimpin, pertimbangan terhadap pemilu selanjutnya, oposisi domestik, ancaman terhadap keberlangsungan rezim, dukungan masyarakat terhadap kebijakan, kompetisi partai, tantangan internal atau eksternal terhadap rezim, ancaman terhadap kekuasaan politik atau legitimasi pemimpin tersebut, demonstrasi rakyat, dan kehadiran pemain dominan di dalam negara (seperti partai dominan).⁴⁷ Pilihan yang memiliki resiko tinggi terhadap aspek-aspek di atas biasanya akan dieleminasi pada tahap awal (*avoid major loss principle*). Oleh sebab itu, tahap pertama ini disebut juga sebagai tahap kognitif.

⁴⁵ Alex Mintz and Karl DeRouen, "Understanding Foreign Policy: Decision Making," *Understanding Foreign Policy: Decision Making*.

⁴⁶ David J. Brulé, "Explaining and Forecasting Leaders' Decisions: A Poliheuristic Analysis of the Iran Hostage Rescue Decision," *International Studies Perspectives* 6, no. 1 (2005): 99–113.

⁴⁷ Mintz, "How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective."

Pada tahap kedua, pemimpin akan memilih keputusan berdasarkan pilihan-pilihan alternatif yang tersisa dari tahap sebelumnya. Pemimpin di tahap ini akan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dari pilihan yang tersedia menggunakan *analytic decision rules*.⁴⁸ *Analytic decision rules* adalah preferensi pembuat kebijakan yang digunakan untuk menyederhanakan proses eliminasi pilihan kebijakan. Preferensi tersebut dapat diidentifikasi melalui tujuan dan berbagai narasi yang disampaikan oleh pemimpin atau pengambil keputusan terhadap suatu isu. *Analytic decision rules* yang berdasar pada prinsip *non-compensatory* antara lain:⁴⁹

1. *Conjunctive Decision Rule* (CON)

Aturan ini mengimplikasikan prosedur di mana setiap pilihan alternatif harus berada pada nilai tertentu di setiap dimensi. Model ini mengandaikan adanya suatu ambang batas pada masing-masing dimensi dan pilihan alternatif dikatakan dapat diterima apabila memiliki nilai di atas setiap ambang batas tiap dimensi.

2. *Disjunctive Decision Rule* (DIS)

Berbeda dengan aturan sebelumnya, *disjunctive* mengharuskan pembuat keputusan untuk menetapkan nilai minimal yang dapat diterima dari setiap dimensi. Suatu pilihan alternatif dikatakan dapat bertahan apabila memenuhi nilai minimal, setidaknya di satu dimensi.

3. *Elimination by Aspect Decision Rule* (EBA)

⁴⁸ Alex Mintz dan Karl DeRouen, "Understanding Foreign Policy: Decision Making," *Understanding Foreign Policy: Decision Making*, no. Januari (2010): 1–168.

⁴⁹ Alex Mintz dan Karl DeRouen, "Understanding Foreign Policy: Decision Making."

Aturan ini akan memberikan bobot yang berbeda pada masing-masing dimensi. Pada aturan ini, dimensi akan digunakan untuk membandingkan alternatif dengan probabilitas yang sebanding dengan bobotnya. Pilihan alternatif yang nilainya tidak mencapai ambang batas pada dimensi utama, akan dieliminasi.

4. *Lexicographic (LEX)*

LEX untuk menentukan pilihan alternatif juga akan mengurutkan dimensi dari yang terpenting hingga yang tidak penting. Pilihan alternatif akan dipilih apabila memiliki nilai tertinggi pada dimensi terpenting.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka teori poliheuristik dinilai akan membantu penelitian ini dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilalui Putin sebelum melancarkan SMO terhadap Ukraina pada tahun 2022. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana perhitungan dan penilaian yang dilakukan pada setiap dimensi yang terlibat pada kebijakan yang diambil. Pada akhir penelitian ini juga nantinya akan dilihat mengapa SMO yang dilancarkan dinilai rasional oleh Putin sebagai seorang pengambil keputusan di negara tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian mengacu pada suatu cara atau aturan yang diikuti oleh seorang peneliti dalam menganalisis dan mencari jawaban dari isu yang ditelitinya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yang diartikan oleh John W. Creswell sebagai pendekatan terkait penggalian dan pemahaman makna

bagaimana individu atau kelompok melihat suatu permasalahan.⁵⁰ Penelitian dengan pendekatan ini memiliki struktur yang fleksibel dan biasanya bersifat induktif.⁵¹ Hasil analisis ini nantinya akan berasal dari pemikiran serta interpretasi yang dimiliki penulis terhadap analisis data-data yang didapatkannya melalui teori yang diterapkan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptis analisis, yang mana diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan secara rinci informasi untuk menggambarkan keadaan suatu permasalahan.⁵² Penelitian deskriptif tidak hanya menjabarkan dan mengklasifikasi data, tetapi juga memadukan dan mengorganisasikan data-data yang didapat melalui landasan suatu teori. Berdasarkan hal itu, peneliti akan berusaha menggambarkan proses pengambilan keputusan Vladimir Putin terhadap keputusannya untuk melancarkan SMO di Ukraina pada tahun 2022 melalui teori poliheuristik.

1.8.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis keputusan SMO yang dilancarkan Putin pada Ukraina pada tahun 2022. Guna menganalisis keputusan tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi pada rentang tahun 2021 hingga tahun 2022. Rentang tahun tersebut dipilih sebab berbagai peristiwa penting yang terjadi pada tahun tersebut sangat membantu peneliti dalam menganalisis kebijakan SMO Putin pada tahun 2022. Tahun 2021 ditandai dengan munculnya rencana oleh Volodymyr Zelensky akan keanggotaan Ukraina terhadap NATO, yang mana pada saat itu

⁵⁰ W. John Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (New Delhi: Sage, 2014).

⁵¹ W. John Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

⁵² Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed. Lutfiah, *Journal of Visual Languages & Computing*, vol. 11 (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019).

langsung direspon oleh Putin dengan meletakkan pasukan militer di perbatasan kedua negara tersebut. Tahun 2022 ditandai dengan dilancarkannya serangan militer pertama Rusia terhadap Ukraina, yang mana masih berlangsung saat penelitian ini dilakukan.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dapat diartikan sebagai subjek yang akan dijelaskan dalam suatu penelitian.⁵³ Oleh sebab itu, unit analisis dapat juga dikatakan sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini, unit analisisnya adalah Vladimir Putin sebagai presiden Rusia, di mana kebijakan SMO itu terjadi akibat keputusannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Rusia telah meletakkan Putin sebagai ujung tombak dalam setiap keputusan negara. Unit eksplanasi atau disebut sebagai variabel independen adalah unit yang perilakunya akan diamati atau unit yang memberikan pengaruh terhadap unit analisis.⁵⁴ Berdasarkan pada definisi tersebut, unit eksplanasi pada penelitian ini adalah kebijakan Rusia dalam penerapan *Special Military Operation* terhadap Ukraina pada tahun 2022.

Tingkat analisis adalah batasan fokus yang ditetapkan oleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian.⁵⁵ Dengan menetapkan tingkatan analisis dalam penelitian, peneliti dapat menentukan fokus objek yang ingin diteliti dan teori yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Pada tingkat analisis, penelitian ini akan menggunakan tingkat analisis individu. Hal itu sebab fokus dari penelitian ini

⁵³ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁵⁴ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.

⁵⁵ Carmen Gebhard, "Levels of Analysis in International Relations," in *Foundation of International Relations*, ed. Stephen McGlinchey (Bloomsbury, 2022), 56–69.

adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan Putin sehingga kebijakan SMO dilancarkan terhadap Ukraina pada tahun 2022. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai analisis induksionis, di mana unit analisis memiliki tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan unit eksplanasi.⁵⁶

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan penulis melalui metode studi pustaka. Metode ini diartikan sebagai proses di mana peneliti mengumpulkan berbagai informasi dan data yang mendukung penelitiannya melalui bahan bacaan, baik dalam bentuk buku, dokumen, atau analisis mengenai isu terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Sumber yang berhubungan dengan dokumen resmi pemerintahan Rusia dan berbagai pandangan pemerintahan terhadap kebijakan luar negerinya didapatkan penulis dari situs resmi pemerintah Rusia, yaitu <http://en.kremlin.ru/>. Pada sumber artikel jurnal, peneliti akan menggunakan beberapa artikel yang diterbitkan oleh *Journal of Conflict Resolution*, *Journal of International Perspectives*, *Public Affairs*, *International Security*, *European Politics and Society*, *Communist and Post-Communist Studies*, *International Journal of Social Science Studies*, *Political Geography*, *Journal of International Relations*, dll.

Terkait dengan isu yang diteliti termasuk dalam isu yang baru dan masih berlangsung hingga saat ini, maka peneliti juga menggunakan beberapa laman berita elektronik sebagai pendukung data dan informasi. Laman berita yang digunakan antara lain Reuters, CNN, CNBC, CBS, Kompas.com, Al-Jazeera, dan

⁵⁶ Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*.

BBC. Informasi dari sumber-sumber inilah yang kemudian akan diolah peneliti dengan menggunakan teori poliheuristik guna menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Informasi-informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah berdasarkan *Applied Decision Analysis* (ADA).⁵⁷ Metode ini nantinya ditujukan untuk membentuk gambaran pilihan-pilihan keputusan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, grup, atau koalisi dan membantu dalam mengungkapkan mekanisme kognitif para aktor tersebut. ADA akan membantu merekonstruksi kembali proses, pencarian, dan karakteristik keputusan yang dianalisis. Berdasarkan hal itu, maka metode ADA akan digunakan dalam penelitian untuk merumuskan tahap pertama dan kedua analisis poliheuristik kebijakan *Special Military Operation*.

Prosedur ADA terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:⁵⁸

1. Mengidentifikasi seperangkat pilihan alternatif yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Contoh pada kasus Rusia-Ukraina saat ini seperti menggunakan kekuatan militer, mengaplikasikan sanksi ekonomi, atau melakukan upaya negosiasi;
2. Mengidentifikasi seperangkat dimensi atau kriteria keputusan yang dapat menjelaskan suatu keputusan. Contohnya adalah dimensi keamanan, dimensi ekonomi, dan dimensi politik domestik;

⁵⁷ Alex Mintz and Eldad Tal-Shir, "Introduction: How Do Leaders Make Decisions? An Applied Decision Analysis Account," vol. 28, 2019, 1–12.

⁵⁸ Alex Mintz dan Eldad Tal-Shir, "Introduction: How Do Leaders Make Decisions? An Applied Decision Analysis Account."

3. Memberikan bobot pada setiap dimensi (tahap ini bersifat opsional). Contohnya seperti memberikan dimensi keamanan pada keputusan penggunaan kekuatan militer sebagai dimensi yang paling penting, dimensi politik sebagai dimensi yang penting, dan dimensi ekonomi sebagai dimensi yang kurang penting;
4. Mengidentifikasi implikasi-implikasi. Contohnya implikasi ekonomi terhadap penggunaan kekuatan militer di Ukraina sangat tinggi, dapat dilihat dari berbagai sanksi ekonomi yang diberikan Barat;
5. Menilai implikasi setiap dimensi terhadap setiap alternatif yang ada;
6. Mengidentifikasi *decision rules* yang digunakan oleh pengambil kebijakan.

Tahapan pertama hingga kelima dalam ADA dikategorikan sebagai tahap pertama atau kognitif dalam teori poliheuristik. Lima tahapan itu akan berfokus dalam mengungkap dan membangun *decision matrix* yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Pada tahap ini, peneliti harus mengidentifikasi pilihan-pilihan alternatif yang dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, dimensi krusial, dan implikasi dari setiap alternatif terhadap dimensi yang telah ditetapkan. Hal tersebut menurut Mintz dan Tal-Shir dapat diidentifikasi melalui dokumen sejarah, opini ahli, analisis penelitian sebelumnya, biografi, dan media berita yang menggambarkan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor terkait.⁵⁹ Tahap keenam termasuk dalam tahap kedua atau tahap rasional teori poliheuristik, di mana akan dilakukan identifikasi penggunaan *decision rule* yang digunakan pembuat kebijakan. Berikut contoh aplikasi teori poliheuristik menggunakan aturan ADA:

⁵⁹ Alex Mintz dan Eldad Tal-Shir, "Introduction: How Do Leaders Make Decisions? An Applied Decision Analysis Account."

Tabel 1.1 Contoh Penerapan Teori Poliheuristik pada Aturan ADA

Tahapan	Indikator	Operasionalisasi (Hipotesis Awal)	Kebijakan <i>Special Military Operation</i> (SMO)
Tahap 1	Identifikasi pilihan alternatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan sanksi ekonomi terhadap Ukraina; 2. Melanjutkan upaya negosiasi terhadap AS, NATO, dan Ukraina; 3. Menerapkan operasi militer terhadap Ukraina. 	
	Identifikasi dimensi yang dapat menjelaskan keputusan yang diambil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi politik domestik menjadi <i>essence of decision</i>; 2. Dimensi keamanan; 3. Dimensi ekonomi. 	
	Memberikan bobot pada setiap dimensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi politik domestik menjadi dimensi yang sangat penting; 2. Dimensi keamanan menjadi dimensi yang penting; 3. Dimensi ekonomi menjadi dimensi yang kurang penting. 	
	Mengidentifikasi implikasi-implikasi setiap pilihan alternatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi ekonomi dapat berdampak terhadap dimensi keamanan Rusia; 2. Upaya negosiasi akan berdampak terhadap dimensi keamanan Rusia; 3. Operasi militer akan berdampak terhadap dimensi ekonomi Rusia. 	
	Menilai implikasi dimensi terhadap setiap alternatif yang ada	Dimensi politik domestik menjadi prioritas Putin sebagai presiden.	
Tahap 2	Identifikasi <i>decision rule</i> yang digunakan oleh pengambil kebijakan.	Menentukan <i>decision rule</i> yang digunakan oleh pengambil kebijakan dalam mengeliminasi pilihan alternatif yang tersisa	

Sumber: diolah oleh penulis

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA

Bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan luar negeri yang dijalankan Rusia selama ini. Penjelasan tersebut nantinya akan terdiri dari Kepentingan Rusia Sebagai *Great Power*, Pandangan Rusia terhadap Negara-Negara *Commonwealth Independent States* (CIS), Kepentingan Rusia terhadap NATO, dan Kepentingan Rusia terhadap Ukraina. Pada subbab Kepentingan Rusia Sebagai *Great Power* akan dijelaskan bagaimana munculnya identitas *great power* pada Rusia dan apa kepentingan yang dimilikinya terhadap identitas tersebut. Pada subbab Pandangan Rusia terhadap Negara-Negara *Commonwealth Independent States* (CIS), akan dijelaskan sejarah terbentuknya CIS, makna penting CIS bagi Rusia, dan kepentingan Rusia pada negara-negara tersebut. Pada subbab terakhir bab ini, akan membahas mengenai kebijakan Rusia terhadap Ukraina, yang menjadi dasar dari tindakan Rusia saat ini.

BAB III VLADIMIR PUTIN DAN DOMESTIK RUSIA

Penjelasan pada bab ini akan terbagi menjadi tiga subbab utama, yaitu Pengambilan Kebijakan Luar Negeri di Rusia, Pandangan Vladimir Putin terhadap Ukraina, dan Pandangan Domestik Rusia. Pada subbab Pengambilan Kebijakan Luar Negeri di Rusia akan dijelaskan dinamika dalam proses pengambilan kebijakan di sana, aktor yang terlibat, dan bagaimana pengaruh Putin sebagai presiden dalam penetapan kebijakan tersebut. Selanjutnya, pada subbab Pandangan Vladimir Putin terhadap Ukraina, akan dijelaskan dasar pemahaman dan bagaimana Putin melihat Ukraina sebagai suatu negara. Terakhir, subbab mengenai Pandangan Domestik Rusia akan menjelaskan bagaimana arus informasi disebarakan di Rusia,

pandangan domestik Rusia terhadap Putin, dan elit-elit politik di negara tersebut terhadap Ukraina.

BAB IV ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN VLADIMIR PUTIN DALAM KEBIJAKAN *SPECIAL MILITARY OPERATION* TERHADAP UKRAINA TAHUN 2022

Bab ini akan menjadi bagian analisis dari penelitian ini. Kebijakan SMO yang dilancarkan oleh Rusia akan dianalisis menggunakan skema teori poliheuristik berdasarkan pada teknik analisis ADA yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menjelaskan analisis tersebut, bab ini akan terbagi menjadi tujuh subbab utama, yaitu Situasi Hubungan Rusia dan Ukraina pada Tahun 2021-2022, Identifikasi Alternatif Kebijakan Vladimir Putin terhadap Ukraina, *Non-compesantory Rule Dimension Based, Avoid Political Loss Aversion*, Rasionalitas Alternatif Kebijakan Tahap Pertama, Kebijakan *Special Military Operation* (SMO) sebagai Keputusan Akhir, dan Analisis Proses Penerapan Kebijakan *Special Military Operation* (SMO) terhadap Ukraina pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran, yang mana merepresentasikan keseluruhan dari hasil penelitian ini serta masukan terhadap penelitian selanjutnya yang membahas topik terkait.